KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA** **SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM** **SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL**	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2035
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**LAYANAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Badan Hukum Perkumpulan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan; 2. Memahami ketentuan pemesanan nama yayasan; 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id; 4. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pesan Nama Perkumpulan; 2. SOP Teknologi Informasi.	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Data Perkumpulan; 3. Printer dan jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam SABH www.ahu.go.id.

SOP / FLOWCHART Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	**Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)**	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan			a. Salinan akta pendirian Perkumpulan b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani oleh Pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya c. sumber pendanaan Perkumpulan d. program kerja Perkumpulan e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan f. notulen rapat pendirian Perkumpulan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak	7 menit	Bukti Transaksi	permohonan pengesahan pendirian telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung dalam secara elektronik)
2	mengunggah akta pendirian.			Upload Akta Pendirian Perkumpulan	5 menit		
3	Mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.				5 menit	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan langsung di unduh oleh Notaris